

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Uraian pada Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi tentang temuan-temuan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diajukan. Sementara itu, rekomendasi berisi tentang masukan dan saran bagi partai politik dan peneliti lain.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil deskripsi, analisis dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bentuk program kaderisasi partai politik bagi kader perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Cianjur dilakukan oleh partai politik secara berjenjang yang dilakukan mulai dari pusat, DPW, DPC, PAC, dan ranting. Bentuk-bentuk kaderisasi yang diselenggarakan oleh partai politik memiliki kesamaan dalam mengkader anggota partainya untuk menjadi pemimpin melalui program pendidikan dan latihan berkaitan dengan visi, misi dan program partai. Proses pelaksanaan diklat pada masing-masing partai memiliki nama dan bentuk yang khas sejalan dengan visi, misi, dan program partai seperti Program Karakterdes (Golkar), Diklat Hambalang (Gerindra), Badiklat (PDIP), Lantang (PBB), LKK (PPP), Tarbiyah (PKS), Pendekatan geo-dakwah, geo-politik dan pendekatan secara

andragogi (PKB). Kuliah umum yang diberikan dari DPP dalam acara diklat kader sampai ke tingkat ranting secara *roudsouw*partai (Hanura).

2. Pola rekrutmen partai politik bagi kader perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Cianjur dilakukan melalui beberapa pendekatan, di antaranya: Pendekatan *Personal Approach*, dilakukan secara personal kepada masyarakat untuk bergabung dengan partai politik; *Institusional Approach*, dilakukan secara kelembagaan misalnya melalui peringatan ulang tahun partai, ulang tahun tokoh-tokoh besar partai, konsolidasi partai dalam bentuk Musran, Muscab, Kompercab, Komperan; serta perekrutan anggota baru dengan cara KTA-nisasi (pendaftaran anggota baru).
3. Strategi pendidikan politik bagi kader perempuan sebagai implementasi pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Cianjur. Strategi pendidikan politik dilakukan melalui upaya di antaranya merumuskan tujuan pendidikan politik dan mengembangkan bentuk-bentuk pendidikan politik bagi kader partai politik. Partai politik memiliki fungsi sebagai agen sosialisasi politik sekaligus sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi yang terlibat dalam kepartaian. Pendidikan politik merupakan proses akan melaksanakan program kaderisasi yang sudah menjadi ketetapan strategi perjuangan partai politik, mengkader para anggotanya. Kaderisasi merupakan pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik

4. Hambatan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Cianjur berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri perempuan itu sendiri, seperti: a) sumber daya perempuan; b) adanya pandangan bahwa politik itu keras; dan adanya stereotipe yang dilabelkan pada perempuan. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar perempuan, seperti: a) sistem pemilu; yang sekarang mengaut sistem terbuka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya itulah yang menang; b) peran organisasi partai politik; c) nilai budaya.
5. Upaya yang dilakukan partai politik untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan keterwaklan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Cianjur difokuskan persiapan untuk menghadapi pemilu tahun 2014 yaitu: a) senantiasa melakukan aktualisasi diri di segala bidang terutama dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan di bidang politik; b) meningkatkan kualitas dan kuantitas kontribusi kepada partai; c) memelihara dan membentuk jaringan vertical dan horizontal; d) membentuk dan memelihara koordinasi dan konsultasi dengan berbagai lembaga kemitraan penunjang dan pendukung keterwakilan perempuan; e) memelihara kontinuitas silaturahmi; f) mempersiapkan dana operasional sejak dini sehingga pada saatnya, tidak terlalu banyak menghadapi kesulitan

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi, antara lain:

## 1. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah harus memiliki *political will* terhadap partai politik agar para caleg perempuan dalam bentuk program-program yang diarahkan ada program pemberdayaan dan pengembangan perempuan dalam ranah publik.
- b. Adanya payung hukum yang menjadi kekuatan bagi kaum perempuan untuk menetapkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi dukungan kebijakan pemerintah terhadap keadilan gender.
- c. Sistem pengajuan calon sementara bagi usur perempuan yang memuat ketentuan jumlah minimal, ternyata tidak realistis karena banyaknya partai yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan tidak adanya ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran, maka kembali muncul ketidakpastian hukum.
- d. Pendataan penduduk yang memilih harus akurat karena masih banyak temuan di lapangan rendahnya akurasi data kependudukan memunculkan penggelembungan suara diberbagai tempat.
- e. Banyaknya kerusakan sarana pemilu baik menyangkut kertas suara maupun kotak suara atau data pemilih yang tidak jelas. Contohnya pemilih yang tercatat sebagai warga berstatus masih balita tetapi tercatat sebagai hak pemilih dalam pemilu, atau data orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai daftar pemilih.
- f. Peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak memberikan pendapat dalam pemilu perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi kehilangan suara seperti gol put dalam pelaksanaan pemilu.

## 2. Rekomendasi untuk Partai Politik

- a. Partai politik perlu meningkatkan kualitas program kaderisasi khususnya dalam bentuk pendidikan politik secara terprogram dan berkelanjutan disertai program evaluasi model pendidikan politik yang efektif dan efisien yang telah dilaksanakan agar terukur hasil yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan politik erta tidak bersifat monoton kegiatan yang telah dilaksanakan oleh partai.
- b. Partai politik perlu melakukan regulasi mengenai mekanisme perekrutan untuk calon anggota legislatif. Proses mekanisme yang sangat longgar sering kali menimpulkan produk pilihan yang sangat tidak proporsional, terutama dari segi kualitas mereka terhadap visi dan misinya.
- c. Partai politik perlu meningkatkan dan memberdayakan perempuan yang ada dalam partai dalam setiap kegiatan maupun kepengurusan partai politik.
- d. Intensifikasi program dengan penekanan kepada penyelenggaraan kegiatan yang bersifat terbuka dan dapat diterima semua kalangan masyarakat.
- e. Setelah melalui berbagai tahapan *affirmative action*, pelan tapi pasti kemajuan mulai diraih, namun ketika ketentuan/keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan sistem suara terbanyak bagi calon jadi anggota legislatif, kembali kaum perempuan dihadapkan kepada perjuangan yang tidak adil. Mereka harus kembali sepenuhnya kepada posisi semula dihadapkan kepada persaingan bebas menghadapi kaum laki-laki.

- f. Mengusulkan kepada partai politik untuk perekrutan kader perempuan yang akan dijadikan sebagai calon-calon legislatif untuk lebih selektif dalam segala hal baik intensitas, integritas, loyalitas terhadap partainya dan tingkat kualitas yang berkompeten di bidang sosial politik.
- g. Diadakannya program regulasi dan kaderisasi yang sifatnya kontinu dan terprogram setiap saat bukan kaderisasi karbitan yang dikader dengan waktu singkat yang hanya untuk memenuhi persyaratan pencalegan atau persyaratan kuota perempuan terpenuhi sehingga menjadi bahan untuk dijadikan syarat lolos partai politik dalam panggung pesta raket (Pemilu) saja.
- h. Kader-kader perempuan yang akan diorientasikan untuk mewakili partainya harus lolos uji pre-post (lolos uji) oleh Dewan Pengurus Partai Politik diantaranya: baik spiritual, perilaku, kepribadian, dan intelektualnya artinya tidak cacat moral, karena mereka akan menjadi figur dan perwakilan rakyat di pemerintahan.
- i. Bagi partai politik masih dalam pembenahan dalam revitalisasi struktur partai melalui intensifikasi konsolidasi.

### 3. Rekomendasi untuk kader perempuan

- a. Perempuan yang akan berkecimpung dalam partai politik harus mempersiapkan diri sejak dini baik kesiapan, mental, spiritual, material, psikologis, intelektual/pengetahuan sehingga memiliki kesiapan untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai anggota legislatif.

- b. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kader perempuan akan pentingnya pendidikan politik agar perempuan melek politik.
  - c. Merapihkan barisan dan memperkuat jaringan kerja sama antar perempuan baik di dalam partai atau pun di luar partai sejajar dalam organisasi perempuan sehingga saling mengkokohkan kekuatan perempuan yang memiliki peran kontribusi yang besar dalam segala bidang. Misalnya bergainung dengan KPPI sebagai mitra kerja (Kaukus Perempuan Politik Indonesia).
  - d. Bagi perempuan yang terjun ke partai politik dan mencalonkan legislatif bukan hanya sekedar background keluarga contoh : ayah, suami, kakak atau saudara yang hanya sekedar kekuatan saja tetapi tidak hanya itu betul-betul akan potensi diri dan kemampuan akan profesionalisme secara pribadi sehingga ketenaran bukan menjadi hal yang bisa diandalkan bagi kemajuan perempuan secara umumnya.
4. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya
- Hasil penelitian yang dibuat masih banyak keterbatasan baik dalam pengolahan data maupun kedalaman isi yang diteliti. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan terbatas serta keterbatasan pengetahuan peneliti dalam melakukan analisis dan pembahasan data penelitian sehingga untuk menjangkau ke semua partai yang ada di Kabupaten Cianjur tidak cukup dengan waktu yang sempit.